

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Media *online* kompas.com secara keseluruhan telah menerapkan fungsinya dilihat dari sub unit analisis yang telah ditentukan peneliti yakni akurasi, faktualitas, kelengkapan unsur 5W+1H, aspek penting dan menarik, pengawasan peringatan dan instrumental, sumber berita, dan nilai berita.

Fungsi yang menonjol dalam pemberitaan 100 hari gebrakan Jokowi-Basuki adalah fungsi korelasi yang menjelaskan tentang sumber berita. Jumlah penilaian tentang sumber berita mencapai 100% dalam penelitian ini. Sumber berita merupakan aspek penting dalam pemberitaan untuk memberikan data yang komprehensif bagi pembaca dalam menginterpretasikan suatu permasalahan yang terjadi. Jokowi menjadi sumber berita utama terkait dengan berbagai topik program kerja yang dilakukannya bersama Basuki.

Fungsi yang belum dimaksimalkan oleh kompas.com dalam pemberitaan adalah fungsi informasi. Hal yang menonjol dari fungsi tersebut adalah masih banyak ditemui pencampuran fakta dan opini pribadi wartawan yang cenderung positif dalam menanggapi berbagai kebijakan yang dilakukan Jokowi-Basuki. Terdapat 43,03% berita yang memiliki percampuran fakta dan opini.

Selain itu, sesuai dengan karakteristik berita di media *online* yang mengutamakan kecepatan terbukti bahwa kompas.com masih memiliki

kekurangan dalam hal kedalaman berita. Hal ini bisa dilihat dari kelengkapan unsur 5W+1H yang masih kurang unsur *why* dan *how*.

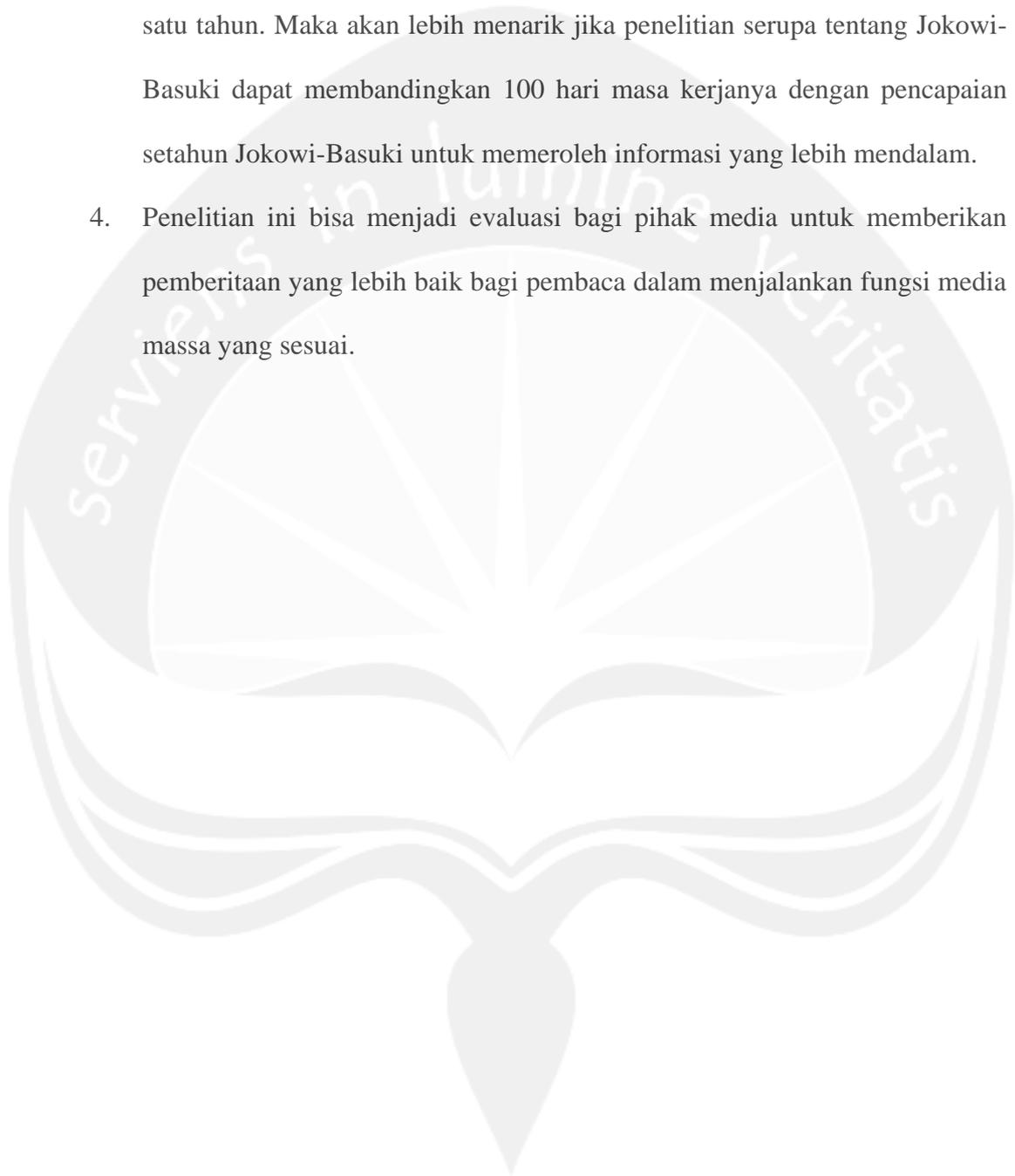
Pada fungsi pengawasan peringatan ditunjukkan dengan berbagai artikel berita yang menunjukkan ancaman bagi masyarakat maupun Jokowi-Basuki dari pihak pemerintah mencapai 51,89%. Untuk fungsi pengawasan instrumental mencapai 67,08%. Hal ini sesuai dengan sifat media *online* yang kerap mengulang isi berita, tujuannya adalah agar pembaca semakin memahami peristiwa yang terjadi. Sedangkan fungsi pewarisan sosial dalam pemberitaan didominasi dengan nilai positif yang mencapai 56,96%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat saran dan evaluasi bagi penelitian:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tabel distribusi frekuensi dalam melakukan analisis data. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan tabulasi silang untuk menjelaskan keterkaitan antarfungsi maupun dengan metode penelitian selain analisis isi supaya tidak hanya melihat isi (*content*) tapi juga bisa menemukan efek pemberitaan secara langsung kepada khalayak.
2. Penelitian ini kurang rinci menjelaskan definisi operasional sehingga kurang fokus dalam hasil penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti mengalami sedikit kesulitan dalam menentukan unit analisis yang tepat dan sesuai untuk menjelaskan fungsi media. Oleh karena itu, penjelasan definisi operasional dalam penelitian yang serupa harus dijabarkan secara lebih jelas dan detail.

3. Penelitian ini hanya membahas 100 hari masa kerja Jokowi-Basuki. Dalam realitasnya di lapangan, masa kerja Jokowi-Basuki telah mencapai evaluasi satu tahun. Maka akan lebih menarik jika penelitian serupa tentang Jokowi-Basuki dapat membandingkan 100 hari masa kerjanya dengan pencapaian setahun Jokowi-Basuki untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.
4. Penelitian ini bisa menjadi evaluasi bagi pihak media untuk memberikan pemberitaan yang lebih baik bagi pembaca dalam menjalankan fungsi media massa yang sesuai.



Daftar Pustaka

- Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Indeks
- Bertens, K. 2004. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dominick, Joseph R. 2011. *The Dynamics of Mass Communication*. UK: McGraw Hill
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Kusumaningrat, Hikmat., Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- McQuail, Dennis. 1992. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. London: Sage Publication
- _____. 2011. *Mass Communication Theory*. terj. Putri Iva Izzati. Jakarta: Salemba Humanika
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2011. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Romli, Asep Syamsul. 2009. *Jurnalistik Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- Soempeno, Femi Adi. 2009. *Indonesia Memilih*. Yogyakarta: Galangpress
- Sumadiria, Haris. 2006. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Remaja Rosdakarya

E-book

Allan, Stuart. 2006. *Online News: Journalism and The Internet*. UK dari bookfi.org (akses 3 September 2013)

Ward, Mike. 2002. *Journalism Online*. Oxford dari bookfi.org (akses 3 September 2013)

Jurnal

Holik, Idham. *Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia dari Konsolidasi Menuju Pematangan*. Jurnal Madani. Edisi II. November 2005. Hal 56-74.

Rabiu, S. Muhammad. *Functions and Dysfunctions of Mass Communication Media*. Journal of Language, Literature, and Communication Studies. Vol 4. No.1. 2010. Hal 165-187.

Sandra, Linda Joyce. *Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 di Media Sosial Twitter*. Jurnal E-Komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi. Vol.1. No.2. 2013. Hal 276-287.

Tkalec, Gordana. *Application of the Internet to Research Journalism and Scientific Research*. Journal of International Scientific Publications: Media and Mass Communication Vol.2. 2013. Hal.120-132

Yusuf, Iwan Awaludin. *Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.14. No.3. Maret 2011. Hal 297-315

Internet

ahok.org. 2012. "Basuki Siapkan Gebrakan 100 Hari Jakarta Baru"
<http://ahok.org/berita/news/basuki-siapkan-gebrakan-100-hari-jakarta-baru/>(akses 3 September 2013)

ahok.org. 2013. "100 Hari Kerja Jokowi-Basuki"
<http://ahok.org/berita/news/100-hari-kerja-jokowi-basuki/> (akses 3 September 2013)

kbbi.web.id

kompas.com.
<http://inside.kompas.com/about-us>(akses 8 September 2013)

kompas.com. 2011. “Merek Kompas Paling Dipercaya”
<http://nasional.kompas.com/read/2011/03/02/10372292> (akses 8 September 2013)

kompas.com. 2013. “Ini Dia Hal-hal Baru di Kompas.com”
<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/29/21090169/Ini.Dia.Hal.hal.Baru.di.Kompas.com>(akses 8 September 2013)

Setiyawan, Dwiki. 2012. Asal Usul Istilah 100 Hari Pertama
<http://politik.kompasiana.com/2012/10/05/asal-usul-istilah-100-hari-pertama-498902.html>(akses 6 November 2013)

Setyaki, Haryo. 2013. “Jokowi dalam Potret Media”
<http://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/13/08/02/mqw65p-jokowi-dalam-potret-media> (akses 3 September 2013)

Tidak Diterbitkan

Astuti, Tina Tri. *Analisis Isi Pemberitaan Polemik Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi pada Media Online Kompas.com Periode Maret – Mei 2012*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta. 2012

Natalia, Fida. *Pemberitaan Seputar Wafatnya Abdurrahman Wahid (Studi Analisis Isi Fungsi Media dalam Pemberitaan Seputar Wafatnya Abdurrahman Wahid dalam SKH Jawa Pos Periode 31 Desember 2009 – 31 Januari 2010)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010

Widjojo, Cati Rahayu W., *Pemberitaan Seputar Jakarta International Djarum Super Mild Java Jazz Festival 2012 (Studi Analisis Isi Fungsi Media pada Pemberitaan Seputar Jakarta International Djarum Super Mild Java Jazz Festival 2012 di Media Online Jazzuality.com)*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2012



LAMPIRAN

PEMBERITAAN GEBRAKAN 100 HARI JOKOWI – BASUKI

(Studi Analisis Isi Fungsi Media Pemberitaan Gebrakan 100 Hari Jokowi – Basuki dalam Liputan Khusus di Media Online kompas.com)

Nama Pengkoder :

Judul Berita :

Tanggal Berita :

1. FUNGSI INFORMASI

a. Akurat: Kesesuaian judul

- Sesuai Tidak sesuai

Faktual: Pencampuran fakta dan opini

- Ada Tidak ada

b. Kelengkapan unsur 5W + 1H

1. What

- Ada Tidak ada

2. Where

- Ada Tidak ada

3. Who

- Ada Tidak ada

4. When

- Ada Tidak ada

5. Why

- Ada Tidak ada

6. How

- Ada Tidak ada

c. Unsur penting atau menarik

1. Penting

- 1 unsur nilai berita penting
- 2 unsur nilai berita penting
- 3 unsur nilai berita penting
- 4 unsur nilai berita penting
- Tidak ada unsur nilai berita penting

2. Menarik

- 1 unsur nilai berita menarik
- 2 unsur nilai berita menarik
- Tidak ada unsur nilai berita menarik

3. **FUNGSI PENGAWASAN**

a. Peringatan: Ancaman

- Ada Tidak ada

b. Instrumental: Informasi

- Ada Tidak ada

4. **FUNGSI KORELASI**

Sumber berita

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Joko Widodo | 10. Kombinasi 2-1 |
| 2. Basuki Thahja Purnama | 11. Kombinasi 2-3 |
| 3. Lembaga Pemerintah | 12. Kombinasi 2-4 |
| 4. Pakar/pengamat | 13. Kombinasi 2-5 |
| 5. Masyarakat | 14. Kombinasi 3-1 |
| 6. Kombinasi 1-2 | 15. Kombinasi 3-2 |
| 7. Kombinasi 1-3 | 16. Kombinasi 3-4 |
| 8. Kombinasi 1-4 | 17. Kombinasi 3-5 |
| 9. Kombinasi 1-5 | 18. Kombinasi 4-1 |

19. Kombinasi 4-2

20. Kombinasi 4-3

21. Kombinasi 4-5

22. Kombinasi 5-1

23. Kombinasi 5-2

24. Kombinasi 5-3

25. Kombinasi 5-4

5. FUNGSI PEWARISAN SOSIAL

Nilai yang tampak dalam berita

- Positif
- Negatif
- Netral



**Hasil Coding Peneliti dengan Coder 1 dan Coder 2
dalam Penelitian 100 Hari Gebrakan Jokowi-Basuki Topik Pendidikan**

1. Sub Unit Analisis: Akurasi

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	A	A	B
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	A	A	A
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	A	A	A
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	A	A	A
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	A	A	A
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	A	A	A
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	A	A	A

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2 (7)}{7+7}$$

$$= 1$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2 (6)}{7+7}$$

$$= 0,8$$

2. Sub Unit Analisis: Faktualitas

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	B	A	B
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	B	A	B
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	A	A	A
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	B	B	B
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	A	A	A
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	B	B	B
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	B	B	B

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder* 1

$$CR = \frac{2}{7+7} (5)$$

$$= \frac{2}{14} (5)$$

$$= 0,7$$

b. Peneliti dengan *coder* 2

$$CR = \frac{2}{7+7} (7)$$

$$= \frac{2}{14} (7)$$

$$= 1$$

3. Sub Unit Analisis: Kelengkapan 5W+1H

- **What, Where, When, Who**

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	A	A	A
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	A	A	A
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	A	A	A
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	A	A	A
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	A	A	A
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	A	A	A
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	A	A	A

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$\begin{aligned} CR &= \frac{2(7)}{7+7} \\ &= 1 \end{aligned}$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$\begin{aligned} CR &= \frac{2(7)}{7+7} \\ &= 1 \end{aligned}$$

- Why

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	A	A	A
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	A	A	A
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	A	A	A
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	A	B	A
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	A	A	A
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	A	A	A
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	A	A	A

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2}{7+7} (6)$$

$$= \frac{2}{14} (6)$$

$$= 0,8$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2}{7+7} (7)$$

$$= \frac{2}{14} (7)$$

$$= 1$$

- **How**

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	A	A	A
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	A	A	A
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	A	A	
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	A	A	B A
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	A	B	A
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	A	A	A
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	A	A	A

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2}{7+7} (6)$$

$$= \frac{2}{14} (6)$$

$$= 0,8$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2}{7+7} (6)$$

$$= \frac{2}{14} (6)$$

$$= 0,8$$

4. Sub Unit Analisis: Unsur Penting

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	3	4	3
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	3	3	3
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	2	3	2
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	3	3	3
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	3	3	3
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	3	3	3
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	3	3	3

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2}{7+7} (5)$$

$$= \frac{2}{14} (5)$$

$$= 0,7$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2}{7+7} (7)$$

$$= \frac{2}{14} (7)$$

$$= 1$$

5. Sub Unit Analisis: Unsur Menarik

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	2	2	1
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	1	1	1
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	2	2	2
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	2	2	2
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	2	2	2
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	1	1	1
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	-	-	-

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2}{7+7} (7)$$

$$= 1$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2}{7+7} (6)$$

$$= 0,8$$

6. Sub Unit Analisis: Pengawasan Peringatan

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	B	B	B
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	B	B	B
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	A	A	B
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	A	B	A
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	A	A	A
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	A	A	B
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	A	A	A

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2(6)}{7+7}$$

$$= 0,8$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2(5)}{7+7}$$

$$= 0,7$$

7. Sub Unit Analisis: Pengawasan Instrumental

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	A	A	A
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	A	A	A
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	B	B	B
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	A	A	A
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	A	A	A
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	A	B	A
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	A	A	A

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2(6)}{7+7}$$

$$= 0,8$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2(7)}{7+7}$$

$$= 1$$

8. Sub Unit Analisis: Sumber Berita

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	Jokowi	Jokowi	Jokowi
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	Jokowi	Jokowi	Jokowi
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah	Lembaga Pemerintah

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

a. Peneliti dengan *coder 1*

$$\text{CR} = \frac{2(7)}{7+7}$$

$$= 1$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$\text{CR} = \frac{2(7)}{7+7}$$

$$= 1$$

9. Sub Unit Analisis: Nilai Berita

No.	Tanggal	Judul Berita	Peneliti	Coder 1	Coder 2
1.	Rabu, 24 Oktober 2012	Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan	Positif	Positif	Positif
2.	Kamis, 25 Oktober 2012	Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh	Positif	Positif	Positif
3.	Kamis, 1 November 2012	Hebatnya Intervensi Kartu Pintar Jokowi	Positif	Positif	Positif
4.	Kamis, 1 November 2012	Kartu Jakarta Pintar untuk Pendidikan Secara Luas	Positif	Positif	Positif
5.	Sabtu, 1 Desember 2012	Jokowi: Tahun Depan Semuanya Dapat Kartu Pintar	Positif	Positif	Positif
6.	Senin, 3 Desember 2012	Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen	Positif	Positif	Positif
7.	Selasa, 8 Januari 2013	Kartu Pintar Jangan untuk Bayar SPP	Netral	Netral	Netral

A: Sesuai

B: Tidak sesuai

b. Peneliti dengan *coder 1*

$$CR = \frac{2}{7} (7)$$

$$\frac{2}{7+7}$$

$$= 1$$

b. Peneliti dengan *coder 2*

$$CR = \frac{2}{7} (7)$$

$$\frac{2}{7+7}$$

$$= 1$$

Jokowi Akan Benahi Protokoler Balai Kota

Senin, 15 Oktober 2012 | 21:22 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan membenahi protokoler di Balai Kota Jakarta. Menurutnya, protokoler saat ini terlalu ketat dan berlebihan. Ia ingin yang sederhana dan efisien.

"Nanti akan saya benahi masalah protokoler. Di sini saya lihat terlalu ketat banget protokolnya. Saf-saf nya itu loh, terlalu banyak. Saf pengamanan enggak usah sampai lima atau tujuh. Protokol enggak usah bersaf-saf seperti yang kita lihat tadi. Harus dibuat se-simple mungkin," kata Jokowi, sapaan akrabnya, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin, (15/10/2012). Hari ini Jokowi dan Basuki dilantik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru menggantikan Fauzi Bowo dan Prijanto.

Terkait protokoler, ia juga kembali menegaskan untuk tidak menggunakan *voorijder* dalam aktivitasnya sehari-hari sebagai gubernur, apalagi saat ia berkeliling meninjau perkampungan di Jakarta. Namun, ia mengingatkan, *voorijder* akan digunakannya saat ia menjemput menteri atau ada duta besar yang datang atau menuju Istana Presiden.

"Saya sudah bilang bolak balik, kalau jemput menteri, ada dubes (duta besar) atau jalan ke Istana Presiden baru saya pakai. Kalau ke kampung-kampung ya enggak usah," kata Jokowi.

Jokowi: Mobil Dinas Pejabat Bebas Aturan Ganjil-Genap

Kurnia Sari Aziza | Kamis, 6 Desember 2012 | 15:12 WIB

JAKARTA,

KOMPAS.com — Wacana pemberlakuan sistem nomor pelat ganjil-genap untuk mengurai kemacetan di Jakarta bukan hanya untuk mobil bernopol B. Mobil dari luar kota yang melintas di jalan Ibu Kota pun diberlakukan aturan tersebut.

"Untuk pelat non-Jakarta, sama saja karena ini bukan masalah pelat B atau bukan B, kan yang dilihat nomor genap atau ganjilnya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012).



Namun, pemberlakuan peraturan ini tidak berlaku bagi angkutan umum, taksi, bus transjakarta, metromini, Kopaja, dan transportasi massal lainnya. "Mobil dinas pejabat bebas aturan ganjil-genap. Nantilah aturan itu akan dibahas lagi berikutnya, akan lebih didetailkan lagi," ujar Jokowi.

Sistem pelat kendaraan ganjil-genap ini memang pernah dicoba dan gagal di Athena, Roma, dan Meksiko. Namun, Jokowi tak mau berkaca pada kota-kota tersebut. Jokowi mengatakan, kalau persiapan dan perencanaan dampaknya semua dilakukan dengan baik, tidak akan ada masalah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Jokowi yakin kebijakan pembatasan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil-genap ini dapat mengurangi kemacetan.

"Kalau kita tidak punya kebijakan radikal dan berani seperti itu, ya tidak akan selesai. Yakin cara ini sebagai salah satu cara untuk atasi macet, harus dicoba," katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur Lalu Lintas Ajun Komisaris Besar Wahyono mengatakan, kebijakan ganjil-genap ini diambil karena dianggap mudah dipahami oleh para pengguna jalan. Setiap hari nomor pelat mobil yang boleh melintas jalan tertentu harus selalu berbeda. Misalnya, pada hari Senin, digit ganjil, kemudian hari Selasa digit genap.

"Polda juga mengutamakan kendaraan yang melintas di jalur yang dilewati bus transjakarta sehingga masyarakat yang punya mobil berpelat ganjil, saat hari genap, ya naik busway," ujar Wahyono.

Harapan Warga Kampung Pulo kepada Jokowi

Penulis: Firly Anugrah Putri | Jumat, 7 Desember 2012 | 19.12 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menimbulkan rasa tersendiri untuk warga Kampung Pulo. Baru kali ini mereka merasa diperhatikan dan mendapat pemimpin yang ingin mendengarkan pendapat masyarakat. Rasa bahagia dan penuh harap itu dirasakan salah satunya oleh Eka (42) dan Yanti (38). Mereka adalah warga Kebon Pala II yang juga ikut menghadiri acara dialog dengan Jokowi di sebuah lapangan di Kampung Pulo.

Sikap persuasif Jokowi yang hangat menyambut setiap senyuman dan jabatan tangan warga yang menyapanya membuat Eka dan Yanti terkagum-kagum.

"Kalau sudah bisa berjabat tangan dengan Pak Jokowi, kami mau salaman, terus mau *sampein* kalau kami pengin banget segera ditangani permasalahan banjir," kata Eka kepada *Kompas.com*, Jumat (7/12/2012). "Selain itu, kami juga sepakat untuk dibangun rusun deret. Ya, supaya teratur *aja*. Kan kami juga selama ini *ngontrak*," ujar Yanti.

Dengan sajian makanan seadanya, seperti buah-buahan, kue di atas meja sederhana melengkapi indahnya pertemuan Jokowi dengan warga setempat.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat melakukan shalat ashar berjemaah di Masjid Al-Barkah yang berada di gang III tersebut. Saat diberi pertanyaan oleh wartawan perihal tujuannya mengunjungi kampung-kampung di Jakarta, Jokowi mengatakan, "Intinya, tiap kampung punya keinginan beda-beda dalam penataan kampung. Sebenarnya sudah dalam rencana, tapi maunya ditampung dulu aspirasi yang diungkapkan warga di setiap kampung," ujar Jokowi.

Jokowi juga berharap, dengan mendatangi warga dan berdiskusi dari kampung ke kampung, dia dapat mengerti bagaimana kemauan warga dan bagaimana peraturan yang akan dibuat tidak merugikan salah satu pihak.

Jokowi Maraton Bagikan Kartu Jakarta Sehat

Kurnia Sari Aziza | Senin, 12 November 2012 | 11:54 WIB



JAKARTA,
KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, hari ini, Senin, (12/11/2012) akan membagikan Kartu Jakarta Sehat di empat wilayah. Pagi ini, Jokowi bersama rombongan media sudah meluncur ke Marunda, Jakarta Utara. Hari ini, dia seharusnya menjadi Inspektur Upacara dalam rangka

Hari Pahlawan dan memimpin Rapat Pimpinan (Rapim). Namun karena agenda pembagian Kartu Jakarta Sehat itu, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama yang beralih menjadi Inspektur Upacara di Lapangan eks IRTI Monas. Jokowi pun langsung meluncur ke Marunda, Jakarta Utara.

Tadi malam, Jokowi juga telah menyampaikan agendanya kepada wartawan saat baru tiba dari Solo. "Besok (hari ini) agendanya melanjutkan bagi-bagiin kartu sehat di Bukit Duri, Marunda, Manggarai, Tanah Tinggi," kata Jokowi, di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu, (11/11/2012) malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun *Kompascom*, Jokowi akan tiba di Marunda pada pukul 09.00 WIB. Kemudian, akan melaksanakan *door to door* pembagian Kartu Jakarta Sehat, sesi foto, dan mencoba Kartu Jakarta Sehat di Puskesmas. Kemudian, pada pukul 10.00 WIB, dia segera meluncur ke Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Di sana ia juga akan *door to door* membagikan Kartu Jakarta Sehat dan sesi foto.

Pada pukul 11.35 WIB, Jokowi akan meluncur ke wilayah selanjutnya, yaitu Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kemudian, pada pukul 12.30 WIB, Jokowi segera meluncur ke tempat berikutnya, yaitu Manggarai, Jakarta Selatan. Kegiatannya di sana juga akan sama dengan kegiatan pada agenda pembagian Kartu Jakarta Sehat sebelumnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (10/11/2012) lalu, Jokowi didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emmawati, telah membagikan Kartu Jakarta Sehat di dua kelurahan, yakni Kelurahan Pademangan Timur dan Kelurahan Tambora. Di sana, dia memberikan 50 Kartu Jakarta Sehat untuk warga di sepuluh RT, di kelurahan tersebut.

Selanjutnya, Jokowi juga membagi-bagikan Kartu Jakarta Sehat kepada warga Kelurahan Tambora. Kartu Jakarta Sehat ini memiliki sasaran kepada 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen jumlah total warga Ibu Kota. Untuk masa ujicoba ini, kartu Jakarta Sehat akan dibagikan sebanyak 3.000 kartu di enam kelurahan yang dinilai kumuh dan padat penduduk. Data penerima kartu sehat disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Kelurahan Bukit Duri akan menerima sebanyak 502 kartu, Kelurahan Pademangan Timur sebanyak 497 kartu, Kelurahan Marunda sebanyak 494 kartu, Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 503 kartu, Kelurahan Tambora sebanyak 504 kartu, dan Kelurahan Manggarai sebanyak 505 kartu.

Normalisasi Kali Betik, Bangunan Liar Dibersihkan

Penulis : Robertus Belarminus | Sabtu, 15 Desember 2012 | 17:23 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan bangunan liar di sepanjang Kali Betik, Jakarta Utara, dibongkar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama puluhan warga, Sabtu (15/12/2012). Tindakan ini yang merupakan bagian dari normalisasi Kali Betik ini juga diiringi dengan pembersihan sampah dari aliran sungai tersebut.

"Di sepanjang bantaran kali tersebut ada puluhan bangunan liar, seperti toilet umum, kandang ayam, kandang bebek, dan lain-lain. Kali ini dinormalisasi untuk mengendalikan genangan yang terjadi di Kelapa Gading terutama saat turun hujan lebat," ujar Kasudin PU Tata Air Jakarta Utara, Sisca Herawati, di Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (15/12/2012). Sisca mengatakan kali tersebut dipenuhi sampah dan eceng gondok serta bangunan liar kali di bantaran kali. Tindakan itu, Sisca menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya genangan air bila terjadi hujan lebat.

Sisca mengatakan, kali tersebut meluap dan menimbulkan genangan air setinggi 30 sampai 50 sentimeter. Sebanyak 130 petugas dari pihaknya, serta sekitar 200 warga terlibat dalam upaya pembersihan tersebut. Tiga unit truk pengangkut sampah dan sebuah alat berat diterjunkan dalam normalisasi tersebut. "Pembersihan eceng gondok maupun bangunan liar dilakukan warga dengan terjun langsung ke kali bersama petugas. Kalau backhoe untuk pengerukan lumpur dan tanah di kali," ujar Sisca. Sisca mengatakan seiring berjalannya waktu, lebar Kali Betik semakin menyempit. Oleh karenanya pihaknya selalu mengupayakan membersihkan eceng gondok dan juga lumpur agar daya tampung kali bisa lebih banyak, sehingga bisa meminimalkan luapan dan genangan air.

Pengerjaan normalisasi Kali Betik dilakukan mulai hari ini, Sabtu (15/12/2012) sampai pada Jumat (28/12/2012) mendatang. "Bila lumpur dan eceng gondok ini diangkat, daya tampung air di kali tersebut akan lebih banyak," kata Sisca.

Komitmen Jokowi Tak Pakai Mobil Dinas

Penulis: Indra Akuntono | Rabu, 17 Oktober 2012 | 18:19 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga hari menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga kini Joko Widodo masih setia dengan mobil Innova hitamnya. Menurut Kepala Bidang Informasi Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Eko Hariadi, Jokowi belum ingin menggunakan mobil dinas yang disediakan.

"Saya rasa itu keputusan beliau (Jokowi), ya kalau kita ikuti apa yang beliau ucapkan selama masa kampanye, tentu konsisten," ujar Eko di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Menurut Eko, tidak dipakainya mobil dinas oleh mantan Wali Kota Solo itu akan berdampak baik, khususnya penilaian yang berkembang di masyarakat.

"Misalnya kedekatan dengan rakyat untuk ikut merasakan. Memilih mobil pribadi sehingga sosok yang muncul kesederhanaan non protokoler," ujarnya.

Saat diminta tanggapannya menilai kinerja Jokowi, Eko enggan berkomentar banyak. Baginya, kepemimpinan Jokowi baru hitungan hari sehingga belum bisa dinilai secara menyeluruh.

"Soal itu saya belum bisa menyimpulkan," jawabnya singkat.

Jokowi: Kartu Sehat dan Jamkesda Beda Jauh

Senin, 12 November 2012 | 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Kartu Jakarta Sehat berbeda dari sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jokowi mengklaim bahwa program Kartu Jakarta Sehat dibangun dengan sistem dan manajemen yang lebih baik.



"Ya beda jauh, dong. Ini (KJS) sistemnya jelas. Ada *billing system*-nya, manajemen

keuangannya menjadi lebih terkontrol dan ada rekam medisnya," kata Jokowi di Tanah Tinggi, Jakarta, Senin (12/11/2012). Jokowi mengatakan, kelebihan pertama dalam Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah semua biaya pengobatan tertera dalam sistem itu dan selanjutnya ada catatan mengenai penyakit pasien pengguna KJS. Semuanya bisa mengetahui rekam medis penyakit pasien pemegang kartu tersebut.

"Sakitnya apa, kalau setiap bulan sakit itu ketahuan, oh bulan Januari sakitnya panu, bulan Februari sakit panas, bulan Maret sakit kurap, semuanya bisa terekam di dalam kartu itu," kata Jokowi.

Yang paling penting dalam sistem KJS ini, kata Jokowi, adalah manajemen keuangannya. Melalui manajemen keuangan itu, dapat terkontrol penggunaannya. Kelebihan Kartu Jakarta Sehat selanjutnya yang membedakan dengan Jamkesda adalah cara mendapatkan Kartu Jakarta Sehat tidak perlu datang ke aparat setempat, seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Warga hanya perlu menunjukkan KTP dan KK ke puskesmas dan akan mendapatkan KJS secara cuma-cuma. Warga pemilik KJS juga tidak akan dikenai bayaran selama pengobatan. "Semuanya, termasuk pemeriksaan darah, gratis. Melahirkan juga ditanggung, yang penyakit berat saja bisa menggunakan kartu ini," kata Jokowi.

Dalam pembagian KJS di Tanah Tinggi, Bukit Duri, dan Manggarai, Jokowi turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati, wali kota, lurah, dan camat setempat. Sebelumnya, Jokowi juga telah membagikan kartu tersebut di dua kelurahan, yakni Kelurahan Pademangan Timur di Jakarta Utara dan Kelurahan Tambora di Jakarta Barat. Di Pademangan Timur, Jokowi memberikan 50 lembar KJS untuk warga di sepuluh RT. Jokowi kemudian membagi-bagikan KJS kepada warga Kelurahan Tambora.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan KJS untuk 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen jumlah penduduk Jakarta. Selama masa uji coba, KJS dibagikan sebanyak 3.000 di enam kelurahan yang dinilai kumuh dan padat penduduk. Data penerima KJS disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Kelurahan Bukit Duri menerima sebanyak 502 kartu, Kelurahan Pademangan Timur sebanyak 497 kartu, Kelurahan Marunda sebanyak 494 kartu, Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 503 kartu, Kelurahan Tambora sebanyak 504 kartu, dan Kelurahan Manggarai sebanyak 505 kartu.

Jokowi Akhirnya Pakai "Voorijder"

Minggu, 4 November 2012 | 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak resmi menjadi Gubernur DKI, Joko Widodo dikenal sebagai pejabat yang "anti"-*voorijder*. Namun, pada Minggu (4/11/2012), Jokowi—panggilan akrab Joko Widodo—akhirnya harus menggunakan *voorijder*.

Jadwal padat dan macetnya lalu lintas di Ibu Kota membuat Jokowi "menyerah". Tiga *voorijder* terlihat di depan mobil Kijang Innova hitam B 1123 RFN yang ditumpangi orang nomor satu di Jakarta itu.

Rombongan Jokowi terlihat melintas di Jalan Tol Jatibening menuju Kementerian Kehutanan di Manggala Wana Bhakti, Jakarta Selatan.

Pengawalan ini diperlukan agar Jokowi bisa tiba tepat waktu di Manggala Wanabakti setelah menghadiri tasyakuran atas terpilihnya dirinya sebagai Gubernur DKI, di Balai Pelatihan Kerja, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Dalam acara yang dihadiri para guru sekolah swasta se-Jakarta itu, Jokowi hanya hadir 20 menit meskipun sempat memberikan sedikit sambutan.

"Maaf, saya tidak bisa berlama-lama. Habis dari sini, pukul 12.00 ada acara di Manggala Wanabakti. Saya pikir lokasinya dari pusat ke sini dekat, ternyata berada di ujung," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku agenda acara pada hari Sabtu dan Minggu terkadang jauh lebih padat ketimbang pada hari kerja biasa. Hari ini saja Jokowi harus menghadiri lima acara. Padatnya acara ini membuat Jokowi harus memilih acara mana saja yang harus dia hadiri.

"Jika dituruti, sangat banyak acara yang harus saya datangi," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Setelah menghadiri acara di Manggala Wanabakti, Jokowi pun pulang ke rumah dinasny.

"Setelah ini, saya tidur dulu. Nanti malam, saya akan ke lokasi kebakaran di Kemayoran, Cempaka Baru, dan Marunda," tuturnya

Jokowi Sidak, Lurah dan Camat Mana?

Selasa, 23 Oktober 2012 | 10:57 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan inspeksi mendadak ke kantor Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga melakukan sidak di kantor Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Di kedua kantor kelurahan itu, Jokowi tak bertemu dengan masing-masing lurah.

Karena tak bertemu sang lurah, Jokowi menanyakan keberadaan mereka. Staf kelurahan di kantor tak dapat menjawab secara pasti dan hanya mengatakan lurah sedang tidak berada di tempat. "Lagi keluar, Pak," kata seorang staf Kelurahan Cempaka Putih Timur, Selasa (23/10/2012).

Sidak Jokowi ke Kelurahan Cempaka Putih Timur itu hanya berlangsung sekitar dua menit. Selanjutnya, Jokowi melanjutkan kunjungannya ke kantor Kecamatan Cempaka Putih. Setali tiga uang, di sana ia juga tak bertemu Camat Cempaka Putih. Alhasil, Jokowi pun hanya mampir sekitar lima menit. Di kantor itu, Jokowi sempat berperan sebagai warga dan bertanya mengenai permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Ini berkasnya mana, terus bayarnya berapa?" tanya Jokowi.

Setelah itu, Jokowi menuju tempat pelayanan KTP. Di tempat tersebut tertera simbol "Buka", tetapi Jokowi menemukan loketnya masih tertutup. "Ini tulisannya 'Buka', tetapi loketnya tutup. Enggak benar ini," kata Jokowi.

Setelah berkunjung ke tiga tempat itu, Jokowi langsung tancap gas kembali ke Balaikota Jakarta. Di Balaikota, ia akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen

Kurnia Sari Aziza | Senin, 3 Desember 2012 | 21:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kartu ini diberikan kepada peserta didik yang tidak mampu dan rawan putus sekolah. Siswa pemegang KJP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebedar Rp 240 ribu per bulan. Sesuai tujuannya, KJP hanya diperkenankan untuk digunakan siswa menutupi keperluan pribadinya terkait pendidikan.

Namun demikian, masih ada saja siswa yang memanfaatkan KJP untuk menopang biaya operasional, misalnya biaya sumbangan pembangunan pendidikan (SPP).



"Ya nanti akan ada tim pengawasnya," kata Jokowi atau Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (3/10/2012). Ia menganjurkan para siswa penerima KJP untuk bijak menggunakan uang yang diberikan setiap bulan.

Jokowi mengatakan baru akan membentuk tim independen kalau semua KJP sebanyak 332.000 kartu sudah dibagikan. "Kalau sekarang kan baru mulai-mulai begini. Jadi baru akan kita sampaikan nanti ya," kata Jokowi.

Saat ini, kata dia, yang mengontrol penggunaan KJP itu adalah guru, orangtua, kepala sekolah, Dinas Pendidikan DKI, dan Inspektorat DKI. Tim independen pengawas KJP itu menurut Jokowi, berasal dari berbagai kalangan dan dari seluruh unsur masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan sebagainya.

"Ya siapa sajalah. Dari seluruh unsur masyarakat," kata Jokowi.

Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Sabtu (1/12/2012) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berhasil membagikan KJP di SMA Yappenda dan SMA Paskalis.

Kartu Pintar untuk Siswa di Permukiman Padat dan Kumuh

Kamis, 25 Oktober 2012 | 21:20 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Kartu Jakarta Pintar terus dimatangkan secara konsep dan teknis penyalurannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak lain yang terkait. Gubernur DKI Joko Widodo rencananya akan meluncurkan kartu tersebut secara langsung di sejumlah permukiman padat pada 10 November 2012, tepat di Hari

Pahlawan Nasional. Lalu mana sajakah permukiman padat yang menjadi target utama penyebaran Kartu Pintar?

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyampaikan, pemberian Kartu Pintar akan diprioritaskan di tujuh wilayah Jakarta yang masuk dalam kategori permukiman padat dan kumuh. Pola pembagiannya merujuk pada data dinas terkait dan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

"Ada tujuh titik utama, yakni Bukit Duri, Tanah Tinggi, Pademangan, Johar Baru, Kampung Melayu, dan dua lokasi lain belum ditentukan. Klasifikasinya padat penduduk, merujuk pada penggunaan SKTM," kata Rio saat ditemui *Kompas.com* se usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPRD di gedung DPRD DKI, Kamis (25/10/2012).

Untuk diketahui, peta pembagian Kartu Pintar pada 2012 ini akan menyentuh 10.000 siswa miskin yang duduk di bangku SMA/SMK. Namun, pembagiannya tidak dilakukan sekaligus. Dimulai dengan pemberian 3.000 Kartu Pintar pada 10 November nanti, dan sisanya diberikan secara bertahap oleh pihak terkait.

Dengan kartu ini, setiap siswa di jenjang tersebut akan memperoleh suntikan dana sebesar Rp 240.000 di setiap bulannya. Uang itu dikhususkan untuk menutup kebutuhan personal para siswa, seperti seragam sekolah, buku, ataupun biaya transportasi. Bekerja sama dengan Bank DKI, kartu ini diformat dalam bentuk ATM sesuai dengan standar dari Bank Indonesia.

Kartu Pintar, Siswa Miskin Terima Rp 240.000 Per Bulan

Rabu, 24 Oktober 2012 | 16:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad mulai memberikan kartu pintar pada 3.000 siswa miskin pada 10 November 2012, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Setiap bulannya, mereka akan menerima Rp 240.000.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto menjelaskan, 3.000 kartu pintar itu akan diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Targetnya pun dikhususkan, yakni siswa miskin dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di permukiman kumuh.

"Tempat dan lokasinya nanti kita sampaikan. Kemungkinan besar di permukiman kumuh, dan Pak Gubernur yang akan memberikan langsung," kata Taufik saat ditemui sesuai menghadiri rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (24/10/2012) di gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Taufik, uang Rp 240.000 per bulan dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan personal tiap-tiap siswa, semisal ongkos ke sekolah, pembelian buku tulis dan cetak, dan seragam sekolah.

Taufik menjelaskan, pemberian kartu pintar sesuai dengan filosofi kelahirannya, yakni untuk optimalisasi pemberian layanan kepada warga DKI, khususnya yang berada di golongan ekonomi lemah. Dalam sektor pendidikan, kata dia, pembiayaan pendidikan terbagi dalam tiga hal, yaitu investasi, operasional, dan personal.

Sejauh ini, pemerintah pusat telah memenuhi kebutuhan investasi dan operasional melalui program rehabilitasi sekolah dan penggelontoran dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP. Oleh karena itu, kartu pintar diluncurkan untuk menyiasati kesulitan warga miskin yang duduk di bangku pendidikan menengah (SMA/SMK) guna memangkas semua kesulitan yang berpotensi menjegal keinginan untuk bersekolah.

"Ini dicarikan solusi agar mereka dapat dan bisa sekolah tepat waktu, dan tak bolos dengan alasan tak punya ongkos. Kami tak ingin itu jadi mengganggu jam belajar, dan kami harus jamin semuanya mendapatkan pendidikan bermutu," harapnya.

Evaluasi Jokowi Untuk Sembilan Tahun Transjakarta

Penulis: Kurnia Sari Aziza | Selasa, 15 Januari 2013 | 21.56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -

Angkutan massal andalan Ibu Kota Transjakarta, hari ini genap berusia sembilan tahun. Diusia yang terbilang cukup matang tersebut angkutan yang memiliki jalur khusus ini justru mengalami penurunan kualitas pelayanan.

Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Joko



Widodo terhadap evaluasi busway Transjakarta yang sudah menginjak usia sembilan tahun. "Ada tiga evaluasi terhadap Transjakarta. Pertama, penuh jumlah busnya. Kedua, sterilkan jalurnya dan yang ketiga, bisa menyalip antar bus Transjakarta di halte nya," kata Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/1/2013). Sementara untuk penambahan armada busway Transjakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menambah sebanyak 102 armada bus Transjakarta bulan ini dengan penambahan armada Kopaja. "Nanti Juni kira-kira tambah 450 armada lagi. Mungkin akhir tahun akan tambah lagi," ujar Jokowi.

Selain akan menambah armada busway, Jokowi juga berjanji akan menambah kapasitas angkut pada Busway Transjakarta tersebut. Ia pun memiliki target pada akhir tahun ini akan selesai. "Targetnya akhir tahun ini rampunglah. Semua jalur rampung. Itu saja kita pengennya," kata Jokowi.

Melalui public hearing yang diselenggarakan oleh Jokowi terkait permasalahan enam ruas tol dalam kota, Jokowi menarik kesimpulan bahwa semuanya menginginkan transportasi massal sesegera mungkin. "Pokoknya yang kita tangkap dari uji public tadi, semua menginginkan angkutan massal segera. Tadi busway kita rampungkan, Monorel mulai, MRT juga dimulai. Kita pengennya itu saja. Tapi juga harus dikalkulasi, jangan awur-awuran," kata Jokowi.

Seperti diketahui menjelang satu dasawarsa Busway Transjakarta, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta masih belum memiliki standar pelayanan minimum (SPM). Berbagai keluhan pun muncul dari pengguna bus Transjakarta, seperti jalur yang semakin tidak steril dan kondisi bus yang sudah tidak layak. Hal tersebut pun mengakibatkan waktu tempuh yang semakin lama. Direktur Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas mengatakan, selama dua tahun terakhir waktu tempuh bus Transjakarta justru semakin lama.

Berdasarkan hasil monitoring Instran, di koridor 1 (Blok M-Kota) pada 2011 waktu tempuh hanya mencapai 34,5 menit, setahun kemudian meningkat menjadi 42,4 menit, dan Januari 2013 mencapai 73 menit. Selisih waktu tempuh selama 2 tahun terakhir meningkat hingga 30,6 menit. Sementara waktu tempuh terlama yakni pada koridor 8 (Lebakbulus-Harmoni) yakni 203 menit.

"Hingga saat ini Transjakarta masih belum dapat keluar dari persoalan awal dan dasar. Masalah tersebut yakni, tidak sterilnya jalur, keterbatasan armada, serta ketersediaan bahan

bakar gas (BBG) baik kualitas maupun kuantitas," kata Darmaningtyas. Selain itu, kata dia, masa tunggu penumpang juga semakin tidak jelas. Di koridor 11 (Pulogebang-Kampungmelayu) khususnya dari arah Pulo Gebang ke arah Perumnas mencapai 20 menit. Kemudian di koridor 10 (Tanjung Priuk-Cililitan) hingga 17 menit, serta di koridor 8 (Lebakbulus-Harmoni) yaitu 15 menit. "Sedangkan rata-rata masa tunggu di semua koridor mencapai 2 sampai 3 menit," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono menyatakan pihak Dishub DKI akan terus berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan bus Transjakarta. Keluhan-keluhan dari masyarakat tersebut dianggap menjadi cambuk untuk dapat berbuat lebih baik. "Yah memang seperti itu realitasnya. Itu cambuk bagi kami untuk perbaiki itu, karena tidak bisa dalam satu tahap," kata Pristono.

Ia mengaku, terdapat tiga hal permasalahan Transjakarta, yakni jalur tidak steril, bahan bakar gas berkurang, dan kurangnya armada. Untuk itu pada tahun ini akan ada penambahan armada sebanyak 450 bus gandeng. "Insya Allah dalam 2013 ini penambahan armada beres," kata Pristono.

Basuki: Sistem "Online" di Kelurahan Tiga Bulan Lagi

Penulis : Indra Akuntono | Selasa, 11 Desember 2012 | 10:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, pihaknya terus menggenjot kinerja seluruh awaknya. Ia bertekad, dalam waktu tiga bulan ke depan, semua kelurahan telah siap terhubung dengan perangkat teknologi *online*.

Fasilitas *online* itu sengaja dibangun untuk memulai era baru. Semua urusan birokrasi

dapat diproses melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan ini, kesulitan masyarakat saat mengurus surat-surat seperti surat izin, surat IMB, KTP, atau lainnya dapat dilakukan lebih cepat dan lebih transparan.

"Jadi, sampai kantor lurah pun sudah ada *fiber optic*. Itu akan kita selesaikan dalam waktu tiga bulan ini," kata Basuki saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Lebih jauh, Basuki juga sangat yakin sistem tersebut telah dapat menyentuh seluruh kecamatan, minimal pada enam bulan ke depan. Tak hanya itu, ia juga berjanji seluruh kantor pemerintahan DKI, termasuk kantor-kantor dinas, dapat memiliki sistem serupa di waktu yang tak berjauhan. Pembangunan jaringan *online* ini terkait dengan rencana penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu mulai tahun depan. Dengan sistem ini, warga di seluruh DKI dapat melakukan proses birokrasi melalui kantor-kantor perangkat daerah, seperti kantor lurah, kantor camat, ataupun kantor wali kota.

Bila menguasai teknologi, warga dapat melakukan input data tanpa perlu ke kantor, sedangkan masyarakat yang tidak menguasai teknologi akan dibantu oleh petugas di kantor-kantor tersebut. Hal ini lebih praktis karena pengurusan surat di semua kantor perangkat daerah nantinya akan lebih sederhana.

Saat ditanya mengenai akan banyaknya pegawai yang kehilangan pekerjaan, Basuki menjawab kebijakan ini tak berkaitan dengan hal tersebut. Menurutnya, sistem pelayanan satu pintu sengaja digelontorkan untuk merampingkan organisasi dan bukan untuk menutup ruang kerja orang lain.

"Pemda kan bukan buat menampung orang. Orang enggak mau kerja di Pemda juga kok kalau saja ada tempat usaha lain. Sekarang saja iklim usahanya susah, semua orang ingin jadi pegawai negeri karena ada jaminan," ujarnya.



Jokowi Pertanyakan Penolakan DPRD Meremajakan Angkutan Umum

Penulis: Kurnia Sari Aziza | Selasa, 27 November 2012 | 01:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertanyakan upayanya untuk meremajakan angkutan umum yang masih belum sepenuhnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Ya, kalau tidak diremajakan, ya akan tetap tua seperti itu. Pertanyaan saya, kalau tidak diremajakan, sudah tua-tua seperti itu sudah 30 tahun, sudah karatan ya itu bagaimana Dewan?" kata Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).

Menurut Jokowi, pihak eksekutif hanya berfungsi untuk mengajukan masukan terkait peremajaan tersebut. Sementara itu, untuk keputusan anggaran dan *budgeting*-nya, itu merupakan tugas DPRD DKI. Jokowi juga mengusulkan untuk meremajakan transportasi umum lainnya, seperti bemo dan bajaj.

"Kami akan mengajukan kembali. Kalau masih tidak setuju, ya nanti diberikan penjelasan agar setuju," kata Jokowi. Anggota Komisi B DPRD DKI Aliman Aat mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memilih perusahaan sehat sebagai pihak penerima hibah 1.000 bus baru pada tahun 2012. Pasalnya, pemberian hibah yang tidak diimbangi dengan pengkajian matang akan melahirkan risiko besar karena terkait dengan pertanggungjawaban anggaran. "Mekanisme hibahnya harus jelas. Siapa yang akan menerima tentunya harus berbadan hukum, harus ada kajian dan komitmen jelas," kata Aliman. Untuk diketahui, rencana pemberian hibah 1.000 bus berukuran sedang muncul karena menjadi program yang diprioritaskan di sektor transportasi. Kehadiran bus baru itu dimaksudkan untuk meremajakan angkutan bus jenis Kopaja-Metromini sejalan dengan misi pemerintahan Jokowi-Basuki untuk meningkatkan pelayanan publik.

Akan tetapi, pemberian hibah tak bisa disalurkan sembarangan karena ada regulasi yang mengikatnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2011 tentang Alokasi Dana Hibah. Penggunaan dana tersebut hanya diperbolehkan kepada BUMN, BUMD, kelompok masyarakat, dan tidak dibenarkan mengalir ke perusahaan swasta.

Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman menolak wacana tentang peremajaan angkutan kota. Penolakan itu secara langsung ia lontarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Legislatif Daerah DPRD DKI Jakarta.

"Andaikata itu benar dilaksanakan, habis semua bus. Saya minta dipertimbangkan karena kami sangat keberatan," kata Soedirman.

Ia mengungkapkan dasar penolakan itu. Menurutnya, semua semakin tak masuk akal karena usulan yang mengemuka mengatur peremajaan angkutan kota di rentang waktu yang sangat singkat, yakni peremajaan bus besar setiap 10 tahun, bus sedang 8 tahun, dan angkutan kecil dalam kurun 7 tahun.

Padahal, dalam banyak diskusi dan hasil kajian, pemilik angkutan akan mencapai *break event point* (BEP) setidaknya setelah kendaraannya beroperasi selama 7 tahun.

Di luar itu, Soedirman juga menuntut pihak terkait untuk tidak memutuskan rencana ini dengan tergesa-gesa. Ia meminta agar ada suatu aturan yang mengatur detail mengenai waktu peremajaan dan kompensasi supaya tidak menimbulkan gejolak setelahnya.